



**PENDIDIKAN DI JAWA PADA MASA
PERGERAKAN NASIONAL
TAHUN 1908-1928**

SKRIPSI

Oleh

**Rofiatul Nur Jannah
NIM 120210302041**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENDIDIKAN DI JAWA PADA MASA
PERGERAKAN NASIONAL
TAHUN 1908-1928**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S 1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Rofiatul Nur Jannah
NIM 120210302041**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Supriyati (Almarhumah) dan ayahanda Moh. Arifin yang tercinta;
2. Guru-guru dan dosen-dosen tercinta terima kasih telah menjadi pelita ilmu;
3. Kakak-kakak tersayang Zaimatus Zahriya, Badriyatul Rohman, Rofiatul Badriyah, Ichwan Busro, Zaimatus Zaifarah, dan Badriyatul Rohim;
4. Suami tercinta Muhammad Chairul Umam;
5. Almamater tercinta, Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember yang saya banggakan.

MOTTO

“... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...” (QS. Al-mujadalah: 11)¹



¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran. 1971. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag. hlm 910-911.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Rofiatul Nur Jannah

NIM : 120210302041

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “*Pendidikan di Jawa pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1908-1928*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab pada keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Maret 2018

Yang menyatakan,

Rofiatul Nur Jannah

NIM 120210302041

SKRIPSI

**PENDIDIKAN DI JAWA PADA MASA
PERGERAKAN NASIONAL
TAHUN 1908-1928**

Oleh

**Rofiatul Nur Jannah
NIM 120210302041**

Pembimbing :

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Sumardi, M.Hum.

Dosen Pembimbing 2 : Dr. Nurul Umamah, M.Pd.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Pendidikan di Jawa pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1908-1928*” telah diuji dan sahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 9 Maret 2018

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sumardi, M.Hum
NIP : 19600518 198902 1 001

Dr. Nurul Umamah, M. Pd.
NIP : 19690204 199303 2 008

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Marjono, M. Hum.
NIP : 19600422 198802 1 001

Drs. Sumarno, M.Pd.
NIP : 19522104 198403 1 002

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph. D.
NIP. 19680802 199303 1 004

RINGKASAN

Pendidikan di Jawa pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1908-1928; Rofiatul Nur Jannah; 2018; xvi+72 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah; Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk mengantarkan manusia dalam menemukan pribadinya sendiri. Pendidikan di Jawa masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928 tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat pribumi. Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda bersifat dualisme, yakni adanya perbedaan antara pendidikan yang diperuntukkan untuk kaum pribumi dan pendidikan untuk anak-anak Belanda.. Sistem pendidikan kolonial tidak diperuntukkan bagi semua anak pribumi melainkan hanya terbatas pada golongan elite. Anak-anak Jawa dididik hanya untuk dipekerjakan sebagai pegawai rendahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah politik pendidikan kolonial Belanda yang melatarbelakangi pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928, (2) bagaimanakah sistem pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) mengkaji secara mendalam tentang politik pendidikan kolonial Belanda yang melatarbelakangi pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928; (2) mengkaji secara mendalam tentang sistem pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928.

Manfaat dari penelitian ini adalah bagi civitas akademi Universitas Jember, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pendidikan di Indonesia pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928 dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, bagi calon pendidik sejarah, penelitian ini diharapkan dapat menambah penguasaan

materi tentang Sejarah Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kompetensi pendidik dalam proses pembelajaran, bagi almamater FKIP Universitas Jember, dapat memberi informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang dilakukan melalui empat tahap yaitu; tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Kesimpulan yang dapat diambil dari garis besar penelitian ini adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai sifat dualisme pendidikan. Selain sifat dualisme, pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah juga bersifat gradualisme, konkordansi, kontrol sentral yang kuat, keterbatasan tujuan, serta tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis. Sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu pendidikan rendah (*lager onderwijs*), pendidikan menengah, pendidikan kejuruan (*vakonderwijs*), dan pendidikan tinggi (*hooger onderwijs*). Pendidikan rendah yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda berdampak pada kehidupan sosial budaya, ekonomi masyarakat pribumi, bahkan politik. Oleh sebab itulah pemuda Indonesia berupaya untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada dengan mendirikan sekolah-sekolah yang bersifat nasionalis.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dikemukakan penulis yaitu: (1) bagi calon pendidik sejarah dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang mengkaji secara mendalam tentang pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928; (2) bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi yang ingin melakukan penelitian mengenai pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928; serta (3) bagi masyarakat luas khususnya pemerintah, semoga tulisan ini menjadi pembelajaran bahwa pendidikan yang terjadi pada masa Pergerakan Nasional menjadi tonggak dalam memperbaiki pendidikan saat ini, sehingga tidak terjadi lagi dualisme pendidikan seperti pada masa Pergerakan Nasional.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pendidikan di Jawa pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1908-1928*”. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M. Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M. Sc., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Drs. Sumardi, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang sangat berguna hingga terselesainya skripsi ini;
4. Dr. Nurul Umamah, M. Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta masukan yang sangat berguna bagi penyempurnaan skripsi ini;
5. Drs. Marjono, M. Hum. dan Drs. Sumarno, M. Pd., selaku Anggota Penguji I dan Anggota Penguji II yang telah memberi masukan yang sangat berguna bagi penyempurnaan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama menyelesaikan studi di Pendidikan Sejarah;
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang telah membantu penulis selama studi;
8. Ayah yang selalu memberi do'a, semangat, kesabaran demi selesainya skripsi ini;

9. Kakak-kakakku Zaimatus Zahriya, Badriyatul Rohman, Rofiatul Badriyah, Ichwan Busro, Zaimatus Zaifarah, dan Badriyatul Rohim yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis;
10. Suami tercinta Muhammad Chairul Umam yang telah mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabatku Tita, Lia, Nuzulul, Fani, Dwi, Fitria, Ifa, Sulis serta teman-teman seperjuangan Pendidikan Sejarah angkatan 2012 yang selalu memberi motivasi kepada penulis;
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 9 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul.....	5
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	12
BAB 4. POLITIK PENDIDIKAN KOLONIAL BELANDA YANG MELATARBELAKANGI PENDIDIKAN DI JAWA PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL TAHUN 1908-1928.....	17

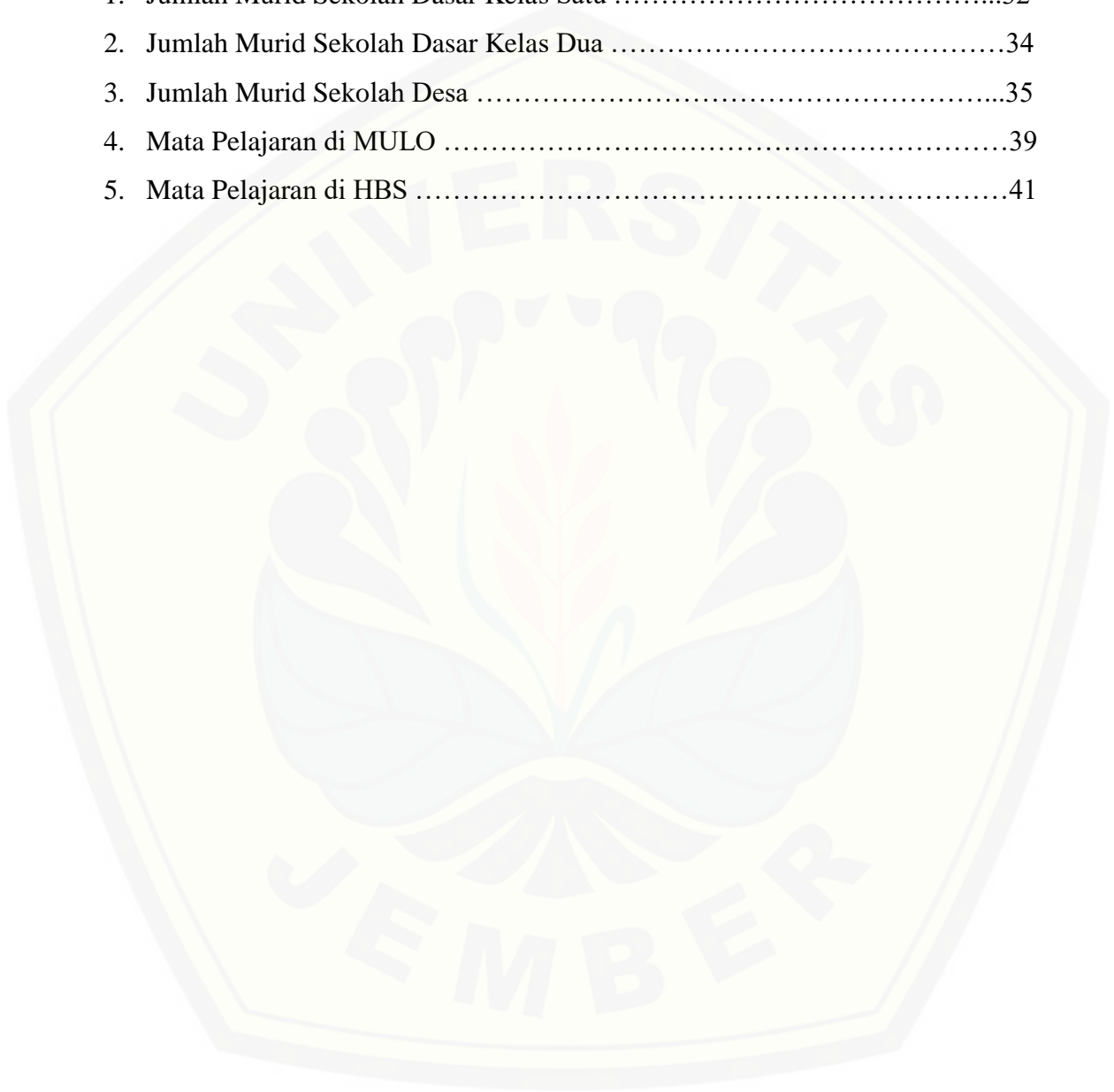
BAB 5. SISTEM PENDIDIKAN DI JAWA PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL TAHUN 1908-1928	28
5.1 Pendidikan untuk Bangsa Asing di Jawa	28
5.1.1 Pendidikan untuk Bangsa Belanda	29
5.1.2 Pendidikan untuk Bangsa Timur Asing (Cina)	30
5.2 Pendidikan untuk Orang Jawa	31
5.2.1 Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial	31
5.2.2 Pendidikan yang diselenggarakan oleh Tokoh Pergerakan Nasional .	45
BAB 6. PENUTUP.....	57
6.1 Kesimpulan.....	57
6.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62

DAFTAR SINGKATAN

AMS	=	<i>Algemeene Middelbare School</i>
ELS	=	<i>Europese Lagere School</i>
HBS	=	<i>Hongere Burger School</i>
HCK	=	<i>Hollands Chinese Kweekschool</i>
HIS	=	<i>Hollands Inlandse School</i>
HIOC	=	<i>Hollands Inlandsch Onderwijs Commissie</i>
INS	=	<i>Indonesische National School</i>
MULO	=	<i>Meer Uitgebreit Lagere Ondewijk</i>
SI	=	<i>Sarekat Islam</i>
STOVIA	=	<i>School Tot Opleiding Van Indische Artsen</i>
THKK	=	<i>Tung Hoa Hwee Kuan</i>
3G	=	<i>Gold, Glory, Gospel</i>

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Murid Sekolah Dasar Kelas Satu	32
2. Jumlah Murid Sekolah Dasar Kelas Dua	34
3. Jumlah Murid Sekolah Desa	35
4. Mata Pelajaran di MULO	39
5. Mata Pelajaran di HBS	41



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Matrik Penelitian	62
B. Sistem Persekolahan Zaman Belanda.....	63
C. Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid ELS	64
D. Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid HIS	65
E. Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid HCS.....	66
F. Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid <i>Volkschool</i>	67
G. Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid <i>Schakelschool</i>	68
H. Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid AMS	69
I. Jumlah Sekolah Bumiputera Kelas Satu.....	70

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk mengantar manusia dalam menemukan pribadinya sendiri. Pendidikan berfungsi untuk membentuk seseorang menjadi pribadi yang dewasa. Pendidikan juga membentuk pribadi seseorang menjadi lebih bertanggungjawab. Melalui pendidikan, masyarakat bebas dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsanya. Ki Hajar Dewantara dalam Ahmadi, 2001:69 berpendapat bahwa pendidikan dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada setiap diri manusia. Pendidikan dapat membawa seseorang dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, dapat memajukan kehidupan bangsa.

Pemerintah kolonial menyediakan sekolah yang beraneka ragam bagi rakyat pribumi. Sekolah-sekolah tersebut didirikan untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai lapisan masyarakat. Pendidikan bagi rakyat pribumi pada mulanya hanya terbatas pada pendidikan rendah, akan tetapi pendidikan tersebut mulai berkembang. Rakyat pribumi dapat mencapai pendidikan yang lebih tinggi melalui pendidikan rendah tersebut. Kenyataannya pendidikan tersebut hanyalah terfokus pada anak-anak yang mendapat pelajaran disekolah-sekolah yang berorientasi pendidikan Barat saja, sehingga dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai sifat dualisme pendidikan. Dualisme pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membedakan pendidikan yang diberikan untuk bangsa Belanda dengan pendidikan yang diberikan untuk anak pribumi. Pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah juga bersifat gradualisme serta konkordansi yang dianggap sebagai penghambat untuk rakyat pribumi melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi.

Pemerintah berusaha untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang bersifat umum bagi penduduk Indonesia. Secara umum, pendidikan didasarkan pada golongan penduduk (rasial), selain itu pendidikan juga didasarkan dari keturunan atau lapisan (kelas) sosial yang ada, serta menurut golongan

kebangsaan yang berlaku. Prinsip pendidikan tidak mengusahakan supaya rakyat dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Kenyataannya pendidikan pada saat itu lebih ditekankan pada kemampuan untuk menjadi pekerja kolonial (Umamah, 1997:17). Penyelenggaraan pendidikan pada masa pemerintah kolonial Belanda dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat pribumi. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah masih terlihat adanya diskriminasi pada setiap lapisan sosial masyarakat. Diskriminasi tersebut terlihat jelas pada masyarakat golongan rendah. Pendidikan yang diberikan pada golongan rendah sangat berbeda dengan pendidikan yang diberikan pada golongan elite.

Usaha yang dijalankan dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan. Unsur moral dijadikan pertimbangan dan perhatian dalam menentukan dasar pendidikan, namun pada pelaksanaannya tidak selaras dengan tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan yang dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah, cenderung memberikan pelaksanaan pendidikan yang menyimpang dari prinsip moral (Umamah, 1997:24). Lahirnya pendidikan-pendidikan tersebut, rakyat Indonesia khususnya Jawa hanya dididik untuk menjadi pekerja-pekerja rendahan diberbagai bidang. Sebagian kecil dari orang-orang terpilih yang dapat bekerja dengan kedudukan tinggi. Pemerintah pada mulanya mendirikan sekolah-sekolah untuk memajukan masyarakat Jawa, akan tetapi pada kenyataannya pemerintah mendirikan sekolah-sekolah tersebut hanya untuk memenuhi kepentingannya saja, bukan untuk kepentingan rakyat.

Mohammad Sjafei beranggapan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah bersifat berat sebelah. Pendidikan yang diajarkan hanyalah mementingkan kecerdasannya saja. Praktek pendidikan dan pengajarannya tidak memperhatikan perkembangan rasa, kecakapan, dan ketangkasan (Poesponegoro, 1984:271). Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak selalu memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Pendidikan pemerintah kolonial pada umumnya hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam bidang intelektual, yaitu mengenal berbagai pengetahuan yang perlu dimiliki oleh setiap

orang. Masyarakat Indonesia merasa dirugikan dengan adanya sistem pendidikan yang seperti itu, karena masyarakat Indonesia hanya dididik untuk bekerja sebagai pegawai rendahan, bukan bekerja untuk menjadi lebih baik. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda bukan untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan pemerintah saja.

Sekolah yang didirikan oleh pemerintah seperti Sekolah Kelas Satu diperuntukkan bagi anak golongan atas, sedangkan Sekolah Kelas Dua diperuntukkan bagi rakyat biasa. Sekolah Kelas Dua dimaksudkan sebagai Sekolah Rakyat yang memberi pendidikan yang bersifat sederhana bagi seluruh rakyat (Nasution, 2014:61). Pendidikan bagi rakyat umum diperluas, secara perlahan Sekolah Kelas Dua diperbanyak. Sekolah Kelas Satu tidak diberikan pelajaran Sejarah Indonesia, pendidikan jasmani, dan pekerjaan tangan. Sifat dari pengajaran tersebut tetap intelektualis, dan tidak berisi semangat kebangsaan atau usaha-usaha untuk perkembangan kebudayaan kebangsaan. Tahun 1914 terdapat perubahan yang cukup besar. Intisari dari perubahan tersebut mendekatkan lapisan atas pada kebudayaan barat, akan tetapi tujuan yang terkandung pada pemerintah tetap seperti dulu, yaitu mendidik anak-anak Indonesia menjadi pegawai yang dapat mengenyam kebudayaan barat. Pendidikan yang ada pada saat itu bukan untuk pertumbuhan, dan perkembangan bangsa secara bebas dan merdeka. Rakyat biasa mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan. Kendala yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam mengenyam pendidikan, khususnya pada rakyat biasa.

Pelajar semakin banyak yang melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut memberikan imbas yang cukup besar pada para pemuda untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya. Peningkatan tersebut dilakukan melalui bidang pendidikan dengan cara mendirikan sekolah-sekolah. Tahun 1924 sampai dengan tahun 1929, terdapat ide-ide tentang pembaharuan pendidikan. Pembaharuan pendidikan tersebut dipelopori oleh para pemuda yang ingin memajukan bangsanya dengan mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang bergerak dalam

bidang pendidikan (Agung, 1984:40-41). Pembaharuan dalam bidang pendidikan, mendobrak para pemuda untuk mendirikan sekolah-sekolah yang berlandaskan nasionalisme. Pemuda merasa bahwa pendidikan yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan pendidikan pada umumnya. Akibat adanya pembaharuan pendidikan muncul berbagai macam sekolah yang didirikan oleh para pemuda Indonesia.

Sistem pendidikan kolonial tidak diperuntukkan bagi semua anak-anak pribumi, tetapi pendidikan tersebut hanya terbatas pada anak golongan elite. Pendidikan untuk anak-anak pribumi dicalonkan menjadi pegawai pemerintah kolonial. Sistem pendidikan kolonial Belanda menimbulkan rasa tidak puas pada rakyat pribumi. Masyarakat pribumi berusaha untuk menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan kepentingan Bangsa Indonesia. Rasa tidak puas tersebut yang kemudian mendorong para pemuda pada umumnya, khususnya organisasi pergerakan nasional untuk mendirikan sekolah sendiri. Pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat pribumi (para pemuda) dilakukan sebagai sarana perjuangan untuk merebut kemerdekaan, serta sebagai upaya untuk merintis pendidikan ke arah pendidikan nasional. Sekolah yang didirikan oleh organisasi pergerakan berlandaskan untuk memajukan rakyat Indonesia. Akibat diskriminasi pendidikan para pemuda mempunyai keinginan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi rakyat Jawa.

Pendidikan pada masa itu bukanlah berpihak untuk kebutuhan masyarakat Jawa, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja rendahan. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan hanyalah untuk permainan politik pendidikan, serta untuk memperoleh perhatian yang cukup dari kalangan masyarakat Jawa. Pendidikan pada saat itu dipengaruhi oleh Politik Etis yang terdiri dari tiga sila adalah Irigasi, Emigrasi, dan Edukasi. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda di Jawa hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja diperkebunan-perkebunan luar Jawa.

Peneliti mengkaji penelitian tersebut karena judul yang dikaji mempunyai keunikan tersendiri. Pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup tinggi untuk

memperbaiki kehidupan masyarakat pada umumnya, bangsa Indonesia pada khususnya. Masyarakat Indonesia melakukan berbagai cara untuk memajukan bangsanya, khususnya dalam bidang pendidikan. Cara yang dilakukan ialah dengan mendirikan sekolah-sekolah yang bersifat nasional, dan mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang mengarah pada pendidikan.

Berdasarkan fakta-fakta dan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928, karena pendidikan pada saat itu masih kurang stabil dan hanya terpusat pada wilayah Jawa saja. Pendidikan pada masa pergerakan nasional terdapat banyak kendala bagi masyarakat biasa untuk dapat mengenyam pendidikan yang sesuai. Ketersediaan buku-buku literatur sebagai sumber data juga membuat peneliti terdorong untuk membuat penelitian tentang “*Pendidikan di Jawa Pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1908-1928*”.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul dimaksudkan untuk lebih memperjelas, dan menghindari terjadinya salah pengertian. Penegasan pengertian judul juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap kata-kata atau istilah yang terdapat dalam judul “*Pendidikan di Jawa Pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1908-1928*”. Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, serta perbuatan mendidik (Depdiknas, 2005:352). Pergerakan nasional adalah kebangkitan untuk perjuangan atau perbaikan yang bersifat kebangsaan (Depdiknas, 2005:356&775).

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud judul “*Pendidikan di Jawa Pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1908-1928*” adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok melalui pengajaran dan pelatihan untuk membangkitkan perjuangan atau pendidikan yang bersifat kebangsaan. Kebangkitan perjuangan dalam dunia pendidikan dilakukan karena adanya diskriminasi dalam pendidikan. Diskriminasi tersebut dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk memperlambat pendidikan bagi masyarakat Jawa.

1.3 Ruang Lingkup

Penentuan ruang lingkup penelitian ini sangat penting bagi peneliti. Penentuan ruang lingkup ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. Pembatasan ruang lingkup dilakukan supaya terfokus pada permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup penelitian ini meliputi waktu (temporal), tempat (spasial), dan materi.

Segi waktu (temporal) penelitian ini dimulai tahun 1908-1928. Tahun 1908 dijadikan batasan awal oleh peneliti karena pada tahun ini merupakan masa awal dari pergerakan nasional. Masa dimana para pemuda Indonesia mulai bergerak untuk memperbaiki kehidupannya, khususnya dalam bidang pendidikan. Tahun 1928 dijadikan batasan akhir karena pada tahun tersebut terjadi radikalisme dalam dunia pendidikan. Radikalisme tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah mulai melenceng dari tujuan Politik Etis. Tujuan politik etis terdiri dari tiga, yaitu pendidikan, transmigrasi, dan irigasi. Radikalisme yang dilakukan karena pemerintah menginginkan suatu pembaharuan dalam bidang sosial secara drastis melalui pendidikan. Melalui pendidikan, pemerintah memperoleh tenaga kerja rendahan yang dapat digaji secara rendah.

Segi tempat (spasial) yang digunakan dalam penelitian ini ialah wilayah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah yang sangat strategis pada saat itu hingga sekarang, selain itu wilayah Jawa merupakan wilayah terbesar di Indonesia. Sekolah-sekolah pada masa pemerintahan kolonial Belanda juga sudah banyak didirikan di wilayah Jawa. Fokus kajian dalam penelitian ini terbatas pada pendidikan di Jawa yang terjadi pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan ruang lingkup yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) bagaimanakah politik pendidikan kolonial Belanda yang melatarbelakangi pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928?
- 2) bagaimanakah sistem pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, ialah:

- 1) untuk mengkaji secara mendalam tentang politik pendidikan kolonial Belanda yang melatarbelakangi pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928;
- 2) untuk mengkaji secara mendalam tentang sistem pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang ilmu sejarah;
- 2) bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Pendidikan di Jawa Pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1908-1928;
- 3) bagi calon pendidik sejarah, penelitian ini diharapkan dapat menambah penguasaan materi tentang Sejarah Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kompetensi pendidik dalam proses pembelajaran; serta
- 4) bagi almamater FKIP Universitas Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Penelitian.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka digunakan sebagai peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjau kembali pustaka tentang masalah yang berkaitan, baik itu laporan penelitian dan lain sebagainya. Tinjauan pustaka berisi tentang pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, tinjauan pustaka juga berisi tentang pendekatan, dan teori yang digunakan oleh peneliti. Kajian pendekatan, dan teori dari para ahli, serta penelitian terdahulu dapat berupa karya yang diterbitkan, dan karya yang tidak diterbitkan. Karya yang diterbitkan dapat berupa buku-buku, jurnal, dan artikel. Sedangkan, karya yang tidak diterbitkan berupa laporan penelitian, skripsi, thesis, dan disertasi.

Heru dalam skripsinya “Sistem Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1900-1942”. Skripsi ini membahas kebijaksanaan sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1900-1940, komponen-komponen sistem pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, serta penyelenggaraan pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1900-1940. Sistem pembelajaran di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda merupakan bagian dari sistem politik yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sistem pembelajaran tersebut tidak didasarkan atas kepentingan rakyat pribumi, melainkan atas dasar kepentingan pemerintah kolonial Belanda sendiri.

Umamah dalam penelitiannya “Sistem Persekolahan Pada Masa Kolonial Belanda di Indonesia”. Penelitian ini membahas sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia. Unsur yang paling pokok dalam sistem pendidikan kolonial Belanda ialah ekonomi dan penjajahan. Unsur pokok tersebut mengakibatkan penyusunan konsep pendidikan tidak dapat terlepas dari kondisi sosial ekonomi dan politik. Hal tersebut menyebabkan terpusatnya sistem pendidikan yang

diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada kepentingan pemerintah kolonial Belanda pada masa itu.

Umamah dalam penelitiannya “Politik Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Periode 1892-1920”. Penelitian ini membahas tujuan pendidikan kolonial Belanda di Indonesia, serta politik pendidikan kolonial Belanda di Indonesia. Tujuan pendidikan kolonial Belanda tidak pernah dinyatakan secara tegas, namun apabila dilihat dari pelaksanaan pendidikannya ialah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kasar hanya untuk kepentingan kaum modal Belanda. Politik pendidikan merupakan inti dari politik kolonial. Jenis pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi ditentukan oleh tujuan-tujuan politik Belanda.

Ekadjati (1998) dalam buku yang berjudul “*Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*”, mengkaji tentang perkembangan pendidikan dari jaman tradisional sampai dengan kemerdekaan. Buku tersebut membahas tentang latar budaya masyarakat dan perkembangan pendidikan, pendidikan tradisional, pendidikan Barat pada abad ke-19 di Jawa Barat, pendidikan pada abad ke-20, serta pendidikan pada zaman Jepang dan Indonesia merdeka. Pendidikan yang didirikan oleh pemerintah terbagi atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Lanjutan, Pendidikan Kejuruan, serta Pendidikan Tinggi. Pada dasarnya pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah bertujuan untuk menjadikan orang-orang Indonesia mengabdikan pada kepentingan pemerintah. Pendidikan yang didirikan pada saat itu hanya diperuntukkan pada sebagian rakyat Indonesia, yaitu hanya untuk orang-orang elite saja. Sedangkan untuk orang-orang golongan rendahan, hanya mampu mengenyam pendidikan yang bersifat rendah, dan sederhana. Oleh sebab itulah muncul sekolah-sekolah daerah seperti Sekolah Rd. Dewi Sartika, Sekolah Keutamaan Istri Lasminingrat, Sekolah Siti Jenab, Bale Pawulangan Pasundan, Ksatrian Instituut, Pesantren Persatuan Islam (Persis), serta Shanti Ashrama (Sekolah PUI).

Soetjianingsih (1981) dalam buku yang berjudul “*Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*”, mengkaji tentang perkembangan pendidikan dari jaman tradisional sampai dengan kemerdekaan. Buku tersebut

membahas tentang latar belakang budaya masyarakat, dan perkembangan pendidikan secara garis besar, pendidikan tradisional, pendidikan Barat pada masa Hindia-Belanda (abad ke-19), pendidikan pada abad ke-20, serta pendidikan zaman Jepang dan Indonesia merdeka. Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyat Indonesia, terbagi atas pendidikan sekolah dasar (ELS, HIS), pendidikan menengah umum (MULO, AMS), dan pendidikan kejuruan. Dalam buku tersebut juga dijelaskan tentang pendidikan yang didirikan oleh organisasi pergerakan nasional seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, Sekolah Nahdatul Ulama.

Berdasarkan kajian buku dari sumber-sumber yang penulis teliti banyak yang mengemukakan tentang sejarah pergerakan nasional secara umum, namun belum ada yang membahas sejarah pergerakan nasional yang dikhususkan mengenai pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai bahasan pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928. Penelitian ini pada dasarnya sama dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang pergerakan nasional, hanya saja ruang lingkup bahasannya dipersempit yaitu mengenai pendidikan di Jawa tahun 1908-1928. Garis besar penelitian ini adalah pada pembahasan awal mengkaji tentang politik pendidikan kolonial Belanda yang melatarbelakangi pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional, dan pembahasan kedua menjelaskan tentang sistem pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional.

Proses analisis dalam kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi pendidikan. Pendekatan sosiologi pendidikan merupakan bagian dari sosiologi. Sosiologi dibedakan menjadi dua, yaitu sosiologi khusus, dan sosiologi umum. Sosiologi pendidikan termasuk dalam sosiologi khusus. Sosiologi pendidikan ialah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam pendidikan yang bersifat fundamental. Pemecahan permasalahan yang dimaksud dalam sosiologi pendidikan ialah untuk mengetahui tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan sosio-kultural. Selain itu, sosiologi pendidikan merupakan sosiologi yang secara khusus menyelidiki struktur, dan dinamika dalam proses pendidikan. Sosiologi pendidikan muncul akibat dari adanya permasalahan-

permasalahan dalam pendidikan yang disebabkan oleh perubahan jaman (Vembriarto, 1993:4-11). Hal tersebut berkaitan dengan judul penelitian, tentang “Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1908-1928”. Dalam judul penelitian tersebut, berisi tentang kondisi pendidikan yang terjadi pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori struktur fungsional. Durkheim dalam Tamburaka (1999:96) menjelaskan bahwa masyarakat dianggap sebagai suatu organisme besar yang tersusun dari bagaian-bagian. Masing-masing dari bagian-bagian tersebut mempunyai kedudukan, peranan, serta fungsi masing-masing. Durkheim menganggap bahwa nilai-nilai moral merupakan dasar dari aturan atau tatanan sosial. Pendidikan atau sekolah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mendidik anak didik menjadi masyarakat yang bertanggungjawab dan bermoral baik. Sikap dan perilaku masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Teori tersebut dirasa cocok oleh penulis apabila digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional, karena pendidikan di Jawa pada saat itu masih dibedakan antara golongan elite dengan golongan biasa.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928, menggunakan metode penelitian sejarah. Metode merupakan suatu prosedur, proses atau teknik yang bersifat sistematis dalam menyelidiki suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan suatu objek (bahan-bahan) yang akan diteliti (Sjamsuddin, 1996:2). Metode penelitian sejarah merupakan proses menguji, dan menganalisa secara kritis rekaman, dan peninggalan masa lampau. Hal tersebut dilakukan untuk merekonstruksi kejadian atau peristiwa dari masa lampau manusia yang otentik, dan dapat dipercaya (Gottschalk, 1975:32). Notosusanto (1971:17) berpendapat bahwa prosedur dalam penelitian sejarah dibagi dalam empat kelompok kegiatan, ialah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah pertama yang akan dilakukan oleh peneliti ialah mencari, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Kegiatan mengumpulkan sumber-sumber sejarah disebut dengan heuristik. Sumber sejarah merupakan bahan penulisan sejarah yang mengandung bukti, baik lisan maupun tertulis. Sejarawan harus mengumpulkan sebanyak mungkin peninggalan yang terkait dengan peristiwa sejarah (Madjid, 2014:211). Sumber yang dikumpulkan merupakan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berkaitan dengan kegiatan heuristik, peneliti berusaha untuk mencari sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928. Penelitian ini merupakan studi literatur. Fakta-fakta terkait dengan permasalahan dapat diperoleh melalui buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, dan skripsi.

Sumber primer merupakan sumber yang ditulis berdasarkan kesaksian dari seseorang dengan mata-kepala sendiri atau panca indra lain atau dengan alat mekanis, yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan atau biasa disebut saksi pandangan mata. Sumber primer yang digunakan oleh peneliti

ialah *Mohammad Hatta: Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa* (tanpa tahun) karangan Amrin Imran; Dewantara, K.H. (1994). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Kedua: Kebudayaan, Cetakan Kedua* (1994) karangan Ki Hajar Dewantara, dan *Serikat Islam Semarang dan Onderwijs: Sebuah Karya Tan Malaka Tahun 1921* (2011) karangan Tan Malaka. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yaitu orang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan (Gottschalk, 1986:35).

Langkah selanjutnya setelah sumber-sumber terkumpul, ialah melakukan kritik atau verifikasi terhadap sumber yang telah diperoleh untuk mencari keabsahan dari sumber tersebut (Gottschalk, 1975:18). Kritik merupakan salah satu langkah dalam metode penelitian sejarah yang berfungsi untuk menyeleksi atau menyelidiki sumber-sumber atau jejak-jejak sejarah, baik dari wujud fisik maupun isinya untuk kemudian dijadikan sebagai fakta sejarah (Notosusanto, 1971:17). Sumber-sumber yang telah diperoleh peneliti, tidak diterima begitu saja. Melainkan sumber-sumber tersebut perlu disaring secara kritis, terutama ialah sumber pertama. Kritik sumber dilakukan peneliti untuk mencari kebenaran (*truth*), sehingga dapat membedakan yang benar dengan tidak benar, dan antara yang meyakinkan dengan meragukan (mustahil) (Sjamsuddin, 1996:103). Kegiatan tersebut dilakukan guna memperoleh sumber yang otentik (asli), dan kredibel (Gottschalk, 1975:80-116). Dengan demikian, akan diperoleh produk dari suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bukan hasil dari suatu manipulasi.

Kritik sumber dilakukan secara intern, dan ekstern. Pada tahapan kritik ekstern, peneliti melakukan verifikasi, dan pengujian terhadap aspek-aspek luar (bentuk fisik) dari sumber sejarah. Kritik Intern dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa sejarah Sedangkan kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan atau autentisitas sumber (Madjid, 2014:223-224). Adapun bentuk luar yang berusaha dinilai dalam penelitian ini ialah: kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, kalimat, ungkapan, huruf, dan segi ungkapan lainnya (Gottschalk, 1975:80-83).

Adapun hasil dari kegiatan kritik ekstern adalah memperoleh sumber yang otentik atau asli. Sumber sejarah dapat dikatakan otentik atau asli ialah jika sumber tersebut benar-benar produk dari orang yang dianggap sebagai pemilikinya (Sjamsuddin, 1996:105). Sumber asli merupakan sumber yang tidak palsu. Sedangkan, sumber otentik merupakan sumber yang melaporkan dengan benar mengenai suatu subjek yang nampaknya benar, dan ditulis oleh orang yang menyaksikan secara langsung (Jasques Barzun & Henry F. Graf dalam Sjamsuddin, 1996:105).

Tahap selanjutnya, yaitu kritik intern untuk melihat keshahihan (kredibilitas), dan reliabilitas informasi yang terdapat dalam buku atau dokumen (Gottschalk, 1975:95). Kritik intern berfungsi untuk mencari suatu kebenaran dari sumber-sumber yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti akan menentukan kredibilitas sumber yang telah dinyatakan otentik atau asli (Kuntowijoyo, 2013:77). Cara peneliti dalam melihat kebenaran tersebut ialah dengan melakukan penyeleksian, dan membandingkan data dari sumber-sumber yang diperoleh. Sehingga peneliti memperoleh sumber yang benar-benar akurat, dan relevan. Dengan demikian, pada kegiatan ini peneliti memperoleh fakta sejarah dari data-data yang telah diseleksi, dan dibandingkan antara satu sama lain.

Langkah yang dilakukan setelah melakukan kritik ialah interpretasi terhadap fakta-fakta (bahan mentah) yang diperoleh dari proses kritik sumber. Interpretasi merupakan suatu upaya dalam menetapkan makna, dan saling berhubungan antara fakta-fakta yang telah berhasil dihimpun oleh peneliti. Interpretasi atau penafsiran sering dikatakan sebagai sebab dari munculnya subjektifitas peneliti (Kuntowijoyo, 2013:78). Fakta sejarah yang ada dihubungkan, dan dikaitkan antara satu sama lain, sehingga antara fakta yang satu dengan fakta yang lain menjadi suatu rangkaian yang harmonis, dan masuk akal. Peneliti menyusun fakta-fakta dari sumber sejarah yang sudah diperoleh secara kronologis, kemudian menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat objektif, dan rasional dengan berdasarkan pada aspek pembahasan.

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu historiografi. Historiografi ialah cara penulisan, pemaparan atau pelaporan dari hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurrahman, 2007:76). Historiografi merupakan penyajian dari hasil interpretasi dalam cerita secara tertulis. Rekonstruksi sejarah menghasilkan suatu peristiwa sejarah, namun gambaran tersebut tidak mungkin diperoleh secara utuh. Oleh sebab itulah, setiap konstruk dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang utuh, dan bulat. Selain itu, juga diperlukan tambahan unsur lain, yaitu imajinasi (Kartodirdjo, 1993:90-91). Sejarah juga membutuhkan imajinasi, sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi setelah suatu peristiwa berlangsung (Kuntowijoyo, 2013:52).

Proses penulisan sejarah, daya imajinasi, dan kreatifitas harus terikat pada fakta-fakta sejarah, dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam penulisan karya ilmiah. Sejarawan juga terikat pada keharusan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Tanpa diberi tambahan atau direkayasa (Kuntowijoyo, 2013:80). Adapun historiografi yang dilakukan oleh penulis ialah dengan menyusun, dan menulis cerita sejarah mengenai *Pendidikan di Jawa Pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1908-1928* dengan cara menggunakan fakta-fakta sejarah yaitu heuristik, kritik, dan interpretasi. Sehingga menjadi cerita sejarah yang bersifat kronologis, logis, rasional, faktual, dan berkualitas (Gottschalk, 1975:32). Langkah terakhir dalam penelitian ini ialah menyusun hasil interpretasi data yang telah diperoleh menjadi sebuah cerita sejarah yang kronologis, dan sistematis dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 6 (enam) bab. Bab 1 pendahuluan yang berisi tentang kajian: latar belakang, penegasan judul, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka berisi tentang kajian: historiografi, penelitian yang relevan, kedudukan peneliti dan penelitian, serta teori dan pendekatan. Bab 3 metodologi penelitian berisi tentang kajian penelitian yang meliputi: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Bab 4 mengkaji tentang politik pendidikan kolonial Belanda yang melatarbelakangi pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-

1928. Politik pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial bersifat dualisme, gradualisme, konkordansi, kontrol sentral yang kuat, keterbatasan tujuan, serta tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis. Sifat-sifat tersebut yang menjadikan anak-anak pribumi kesulitan dalam mengenyam pendidikan. Pembagian dalam pendidikan juga menjadi salah satu penyebab sulitnya anak-anak pribumi memasuki sekolah berstandar Barat. Bab 5 mengkaji tentang sistem pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928. Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil dari suatu perencanaan secara menyeluruh, melainkan langkah yang didorong oleh kebutuhan praktis dibawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Peristiwa-peristiwa yang terjadi didunia luar, mendorong dipercepatnya suatu pengembangan sistem pendidikan yang pada akhirnya memberikan kesempatan kepada setiap anak-anak desa (pribumi) khususnya Jawa untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Kenyataannya hanyalah anak-anak tertentu saja yang dapat mengenyam pendidikan, khususnya anak-anak elite dan kaum priyayi. Bab 6 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**BAB 4. POLITIK PENDIDIKAN KOLONIAL BELANDA YANG
MELATARBELAKANGI PENDIDIKAN DI JAWA PADA
MASA PERGERAKAN NASIONAL TAHUN 1908-1928**

Masa pemerintahan Van Deventer, dilaksanakannya sebuah program pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Program tersebut lebih dikenal dengan sebutan Politik Etis. Van Deventer berkeinginan untuk memperbaiki irigasi supaya produksi pertanian dapat meningkat. Van Deventer juga menganjurkan kepada penduduk Jawa untuk bertransmigrasi. Transmigrasi tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk Jawa yang sangat padat. Usaha tersebut akan sia-sia tanpa adanya pendidikan massa. Pendidikan serta emansipasi bangsa Indonesia berjalan secara berangsur-angsur merupakan inti dari pelaksanaan politik etis. Tujuan dari politik etis ialah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui irigasi, transmigrasi, serta pendidikan yang mempunyai peran masing-masing.

Van Deventer dalam dunia pendidikan cenderung mengembangkan pembelajaran tentang bahasa Belanda. Van Deventer beranggapan bahwa seseorang yang mampu menguasai bahasa Belanda cenderung lebih maju serta dapat menjadi seorang pelopor bagi orang lain. Bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar dalam beberapa sekolah, namun bahasa Belanda tidak dapat menjadi bahasa rakyat yang mampu dipahami oleh semua orang. Orang-orang Belanda tampak keberatan apabila bahasanya dipelajari oleh orang lain, khususnya orang-orang Indonesia, bahkan orang-orang Belanda merasa takut apabila orang-orang pribumi dapat menguasai bahasa Belanda dengan baik.

Sejak awal dijalankannya politik etis, sudah tampak kemajuan yang sangat pesat dalam dunia pendidikan di Jawa. Jumlah sekolah-sekolah rendah meningkat dengan cepat, dibukanya sekolah-sekolah yang berorientasi Barat, baik bagi anak-anak Cina maupun anak-anak Indonesia. Pendidikan berkembang secara vertikal dengan lebih mudahnya anak-anak Indonesia, khususnya Jawa untuk melanjutkan pendidikannya. Kesuksesan politik etis tidak terlepas dari adanya keuntungan

yang diberikan untuk memenuhi para pekerja dalam perusahaan-perusahaan besar yang berkembang secara pesat dengan modal yang cukup besar pula. Politik etis dapat berhasil apabila bank-bank dalam ekspansi teritorial serta penanaman modal telah mencapai puncak keberhasilannya.

Politik etis tidak berlangsung lama, hanya berlangsung kurang lebih dua dekade, hingga pada akhirnya politik etis mendapatkan arti yang tidak baik di Indonesia serta menimbulkan cemoohan di kalangan orang-orang Belanda itu sendiri. Kesejahteraan untuk rakyat Indonesia tidak dapat dirasakan dengan mudah. Pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah hanya dapat dirasakan oleh orang-orang golongan atas. Pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa diperketat dengan sedemikian mungkin supaya tetap rendah dan sederhana. Rakyat biasa hampir tidak dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi, namun pendidikan yang berorientasi Barat meskipun terbatas bagi rakyat biasa atau golongan kecil yang dimaksudkan untuk memperoleh pegawai rendahan memunculkan elite intelektual baru. Anak-anak Indonesia khususnya Jawa yang telah mengenyam pendidikan Belanda merasa asing dengan budayanya sendiri, terlebih lagi budaya tradisonal Indonesia, tetapi elite intelektual menjadi juru bicara nasionalisme Indonesia yang menolak pendidikan berorientasi Barat atau anti Barat. Elite intelektual beranggapan bahwa pendidikan yang seharusnya lebih mendekatkan bangsa Belanda dengan bangsa Indonesia, namun nyatanya menjauhkan kedua bangsa tersebut.

Politik pendidikan pemerintah kolonial sangat erat dengan hubungan politik yang didominasi oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Politik pemerintah kolonial juga tidak ada dorongan dari nilai-nilai etis untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahannya (Nasution, 2014:20). Akibatnya pelaksanaan politik etis lebih berpihak pada pemerintah, terlebih dalam bidang pendidikan. Rakyat Indonesia merasa bahwa pendidikan yang diperuntukkan bagi bangsanya dianggap sebagai berat sebelah, karena pendidikan pada saat itu lebih berpihak pada orang-orang golongan atas atau priyayi.

a. Dualisme

Praktik dualisme sudah ada sejak masa VOC. Dualisme ini menyerahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan baik itu tentang pengadilan maupun hukum kepada raja-raja setempat. Pemerintah kolonial menerima segala keputusan tersebut karena dianggap sebagai sesuatu yang bersifat efektif. Dualisme ini mulai berlakunya sistem pemerintahan, pengadilan, maupun hukum tersendiri untuk berbagai macam golongan penduduk, khususnya penduduk pribumi. Dualisme dijadikan sebagai ciri khas dalam dunia pendidikan pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia. Ciri tersebut terlihat pada perbedaan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi. Sekolah-sekolah tersebut dibedakan berdasarkan ras maupun tingkatan sosial seseorang.

Sekolah-sekolah untuk anak-anak Belanda dan pribumi mempunyai kurikulum, bahasa pengantar, bahkan biaya sekolah yang berbeda. Sekolah yang berorientasi Barat menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda, sedangkan sekolah yang berorientasi lokal atau sekolah untuk anak-anak pribumi menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu atau bahasa daerah. Pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi hampir tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, bahkan pendidikan tersebut dapat dibilang sebagai jalan buntu untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih baik.

Ciri dualisme lainnya dalam dunia pendidikan adalah adanya pendidikan yang berbeda bagi anak-anak Belanda dan anak-anak pribumi. Anak-anak Belanda yang tingkat sosialnya tinggi dapat dengan mudah masuk ELS kelas satu, sedangkan bagi anak-anak Belanda yang tingkat sosialnya rendah atau anak-anak golongan rendah hanya bisa masuk ELS bukan kelas satu (Nastion, 2014:24). Pendidikan bagi anak-anak pribumipun terdapat diferensiasi yang serupa dengan pendidikan anak-anak Belanda. Anak-anak pribumi yang bertempat tinggal di daerah pedesaan hanya dapat masuk ke Sekolah Desa, sedangkan anak-anak pribumi yang bertempat tinggal di daerah kota atau pusat perdagangan serta daerah industri dapat masuk ke Sekolah Kelas Dua.

Anak-anak Indo-Belanda yang bertempat tinggal di desa lebih mudah untuk masuk ke sekolah Belanda daripada anak-anak saudagar pribumi yang kaya

raya. Anak-anak pribumi yang bukan Belanda diwajibkan untuk membayar uang sekolah. Uang sekolah tersebut jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan uang sekolah yang harus dibayarkan oleh anak-anak Belanda. Sekolah-sekolah berbahasa pengantar Belanda dibedakan menjadi tiga sekolah yaitu sekolah untuk anak-anak Belanda (ELS), sekolah untuk anak-anak Indonesia (HIS), sedangkan sekolah untuk anak-anak Cina (HCS).

Dualisme dipandang sebagai konsekuensi yang nyata bagi berbagai bangsa yang hidup bersama dalam satu hubungan pemerintah kolonial yang sama namun masing-masing bangsa mendapatkan hak yang berbeda-beda. Orang-orang Belanda dianggap sebagai penguasa, penjajah, bahkan orang yang memberikan pekerjaan bagi penduduk pribumi, sedangkan orang pribumi sendiri dianggap sebagai buruh, orang yang terjajah, dan pekerja kasar. Orang-orang Belanda mempertahankan sistem kolonial tersebut hingga akhir masa penjajahan di Indonesia. Pembedaan ras dalam pemerintahan kolonial dianggap sebagai suatu alat untuk menjaga pertahanan Belanda terhadap penduduk pribumi yang semakin lama semakin banyak memunculkan elite intelektual baru yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak pribumi dibatasi, khususnya untuk sekolah yang berorientasi Barat. Pemerintah kolonial Belanda menghindari ketidakpuasan yang dirasakan oleh anak-anak pribumi, bahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia pendidikan seraya ditolak secara mentah-mentah oleh pegawai pemerintahan.

Penduduk pribumi secara berangsur-angsur mulai menentang adanya sistem dualisme pendidikan. Ketua Kongres Pendidikan pada tahun 1919 mengajukan sebuah pertanyaan kepada pemerintah kolonial, apakah pendidikan yang dilaksanakan atas dasar perbedaan ras dan sosial masih ada makna atau manfaat bagi orang itu sendiri (Nasution, 2014:26). Pendidikan seharusnya didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kemampuan tersebut digunakan untuk menjalin sebuah kerjasama yang bersifat permanen antar berbagai macam bangsa. Setelah terjadinya Perang Dunia I, mulailah pendidikan yang ada di Indonesia khususnya pendidikan menengah lebih terbuka untuk anak-anak pribumi. Sekolah menengah tersebut menerima murid-

murid tanpa memancang perbedaan ras maupun perbedaan kebangsaan murid tersebut.

b. Gradualisme

Pemerintah kolonial dirasa sangat lambat dalam memperhatikan kondisi pendidikan di Indonesia, akan tetapi sejak munculnya VOC, pendidikan di Indonesia mulai diperhatikan. Pendidikan di Belanda diserahkan semuanya pada gereja, namun pendidikan di Indonesia tidak diserahkan pada gereja, bahkan VOC mencegah gereja untuk menyebarkan pendidikan. VOC merasa bahwa apabila penduduk pribumi memperoleh pendidikan yang setara dengan di negeri Belanda, maka kaum elite intelektual akan menghancurkan monopoli yang dijalankan oleh pemerintah kolonial. Uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia hanya diberikan sedikit, hal itu dikarenakan adanya paksaan untuk memenuhi kebutuhan pengawas perkebunan pemerintahan.

Pendidikan pada masa ini anak-anak Belanda dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah, akan tetapi pendidikan untuk anak-anak pribumi tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah. Tahun 1914, anak-anak pribumi dapat melanjutkan pendidikan menengah, karena pada tahun tersebut telah dibuka sekolah menengah untuk anak-anak pribumi. Sekolah yang didirikan tersebut bukan berbahasa Melayu, melainkan berbahasa Belanda. Sekolah menengah lanjutan yang berbahasa Melayu tidak kunjung disediakan oleh pemerintah kolonial. Alasan yang ada dari pemerintah menjadikan lambatnya perkembangan pendidikan untuk anak-anak pribumi. Pemerintah beranggapan bahwa segala macam urusan penduduk diserahkan semuanya kepada masing-masing raja, karena orang-orang Belanda tidak ingin mengganggu adat istiadat daerah setempat. Raja-raja daerah setempat telah diberikan dorongan oleh Gubernur Jenderal, namun raja-raja tersebut tetap tidak berbuat banyak mengenai dunia pendidikan. Orang-orang pribumi, khususnya para priyayi Jawa atau golongan orang ningrat merasa cemas apabila anak-anak mereka dididik dengan cara Barat.

Awal abad ke-20, pendidikan mulai lebih diperhatikan oleh pemerintah. Pendidikan mulai dibuka akibat pemerintah membutuhkan tenaga kerja (pegawai) pemerintahan serta pegawai pabrik rendahan. Orang-orang pribumi mendesak pemerintah untuk segera membuka sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi, sehingga pemerintah tidak lagi dapat mengulur waktu. Orang-orang pribumi mendesak pemerintah karena mereka berkeinginan anak-anak pribumi dapat melanjutkan pendidikan yang lebih baik dan lebih tinggi untuk mencapai suatu perubahan dalam hidupnya.

Gradualisme menjamin adanya kedudukan yang menguntungkan bagi orang-orang Belanda, khususnya pemerintah. Pemerintah membatasi anak-anak pribumi untuk mengenyam pendidikan (Nasution, 2014:23). Gradualisme dilaksanakan karena pemerintah berkeinginan supaya anak-anak Belanda lebih maju daripada anak-anak pribumi. Pemerintah juga beranggapan bahwa apabila pendidikan yang diberikan kepada anak-anak pribumi terlalu banyak, hal itu dapat menjadi bahaya bagi pemerintah kolonial. Pemerintah juga mengurangi jumlah sekolah-sekolah menengah. Pemerintah merasa takut apabila anak-anak pribumi dapat menguasai bahasa Belanda, hal itu dapat menjadi ancaman bagi pemerintah. Pengurangan jumlah sekolah mengakibatkan lambatnya pendidikan bagi anak-anak pribumi khususnya Jawa. Jumlah pelajar anak-anak pribumi yang dapat melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah menengah lebih sedikit jika dibandingkan dengan anak-anak Belanda maupun anak-anak Cina.

c. Konkordansi

Prinsip konkordansi bertujuan untuk menjaga supaya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia khususnya Jawa pada saat itu tetap berada pada kurikulum serta standar pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah yang ada di Belanda. Tujuan prinsip konkordansi mempunyai maksud untuk mempermudah perpindahan murid-murid yang ada di Indonesia ke sekolah-sekolah yang ada di Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial hanya dikhususkan bagi anak-anak Belanda yang berada di Indonesia, namun lambat laun tidak sedikit orang-orang Belanda yang bekerja sebagai pegawai telah

pensiun dan kembali ke Belanda sehingga anak-anak Belanda perlu melanjutkan sekolahnya di Belanda (Nasution, 2014:31). Kebutuhan akan pendidikan menjadikan adanya sekolah Belanda di Indonesia yang setara dengan sekolah-sekolah yang ada di Belanda, karena sewaktu-waktu terjadi perpindahan murid dari Indonesia ke Belanda.

Inspektur ditugaskan untuk mengusahakan dengan baik dan benar supaya sekolah-sekolah Belanda mempunyai mutu yang sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Belanda. Tujuan yang hendak dicapai sekolah Belanda di Indonesia disesuaikan dengan sistem pendidikan seperti sekolah-sekolah yang ada di Belanda, baik sekolah rendah maupun sekolah menengah, kurikulum yang ada di sekolah-sekolah Indonesia sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Belanda. Guru-guru yang mendidik disekolah khusus anak-anak Belanda di Indonesia hanyalah guru yang mempunyai kualifikasi sama dengan guru-guru yang mendidik disekolah yang ada di Belanda. Sekolah-sekolah yang berorientasi Belanda di Indonesia telah mencapai tujuan tersebut, sehingga lulusan dari HBS yang ada di Indonesia tidak lagi mendapatkan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya melanjutkan pendidikan ke universitas yang ada di Belanda.

Anak-anak Jawa dan anak-anak Cina semakin lama semakin banyak yang masuk ke sekolah ELS, hal itu menjadi suatu masalah bagi pemerintah. Anak-anak lulusan ELS tidak melanjutkan pendidikannya ke Belanda, hal itulah yang menjadi persoalan bagi pemerintah. Akibat dilaksanakan prinsip konkordansi, kurikulum yang ada pada ELS tidak mampu menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. ELS yang berdiri di Indonesia lebih cenderung berorientasi pada Belanda, bahkan segala sesuatu dipusatkan pada kondisi yang terjadi di Belanda bukan Indonesia. ELS bahkan tidak memandang budaya yang ada di Indonesia. Kurikulum dalam setiap sekolah yang ada tidak pernah menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Pemberlajaran bahasa yang dianggap penting bukanlah bahasa Melayu, melainkan bahasa Perancis.

d. Kontrol Sentral yang Kuat

Pemerintah kolonial Belanda mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Perubahan dalam dunia pendidikan harus memperoleh persetujuan dari Gubernur Jenderal atau Direktur Pendidikan. Keputusan yang diambil oleh Gubernur Jenderal dipertanggung jawabkan kepada Raja Belanda. Keputusan Gubernur Jenderal berdampak pada dunia pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia akibatnya pendidikan untuk masyarakat Jawa diperketat.

Pemerintah kolonial Belanda berada di bawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan perintah atas nama Raja Belanda. Gubernur Jenderal mempunyai hak untuk mengeluarkan peraturan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Jajahan. Menteri Jajahan harus menjawab semua pertanyaan secara terperinci mengenai pemerintahan jajahan, baik itu pertanyaan mengenai politik, pendidikan, maupun anggaran biaya yang telah digunakan. Akibat dari itu semua yaitu Gubernur Jenderal cenderung untuk mengawasi administrasi pusat secara ketat (Nasution, 2014:26-27). Pengawasan administrasi pusat secara ketat dilakukan untuk melindungi diri Gubernur Jenderal sendiri. Pengawasan administrasi diperetat karena pertanggung jawaban Gubernur Jenderal terhadap Raja Belanda sangat besar, segala sesuatu meskipun hal yang dianggap tidak penting juga diminta pertanggung jawaban.

Gubernur Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sebuah badan yang bernama *Raad van Indie*. *Raad van Indie* adalah badan penasihat dalam badan legislatif dan eksekutif (Nasution, 2014:27). Gubernur Jenderal mempunyai hak untuk meminta pendapat pada badan penasihat tersebut mengenai beberapa hal tertentu. Persoalan-persoalan mengenai pendidikan yang terjadi di Indonesia melalui Gubernur Jenderal juga dipertimbangkan melalui badan penasihat tersebut. Gubernur Jenderal juga dibantu oleh Sekertariat Umum. Sekertariat Umum mempunyai tugas untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kepala-kepala departemen.

Gubernur Jenderal juga dibantu oleh sebagian besar pegawai negeri yang terbagi dalam Sembilan departemen, misalnya Departemen Pendidikan,

Departemen Agama, Departemen Industri, dan lain sebagainya (Nasution, 2014:27). Kepala departemen diangkat secara langsung oleh Gubernur Jenderal. Kepala departemen juga bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Keputusan yang akan diambil oleh Gubernur Jenderal membutuhkan keterangan dari departemen yang bersangkutan. Gubernur Jenderal tidak mengizinkan kepala departemen pendidikan dan agama untuk berhubungan langsung dengan Menteri.

Masalah pendidikan di tahun 1908 diputuskan secara langsung oleh para pegawai Belanda tanpa adanya pendapat dari orang-orang Indonesia. Perubahan pendidikan di Jawa terjadi setelah berdirinya *Volksraad*, sebab dengan berdirinya *Volksraad* masyarakat Jawa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat (Nasution, 2014:28). *Volksraad* mempunyai peran penting dalam dunia pendidikan selanjutnya. Keputusan akhir dalam menentukan peraturan di dunia pendidikan tetap berada dalam tangan Gubernur Jenderal, oleh sebab itulah pendidikan yang ada pada saat itu dikontrol secara sentral oleh pemerintah kolonial Belanda. Orang tua murid beserta guru-guru yang ada tidak mempunyai pengaruh secara langsung dalam politik pendidikan yang ada saat itu. Pemerintah pusat memegang peranan yang sangat kuat terhadap pendidikan, baik mengenai kurikulum, buku pelajaran, jenis sekolah, pengangkatan guru, dan lain sebagainya.

e. Keterbatasan Tujuan

Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah untuk anak-anak pribumi bertujuan untuk mendidik anak-anak pribumi sebagai pegawai rendahan di perkebunan milik pemerintah. Pemerintah kolonial Belanda berencana untuk memperluas pendidikan untuk anak-anak pribumi. Perluasan pendidikan tersebut disebabkan meningkatnya kebutuhan akan pegawai rendahan dan juga juru tulis. Pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi diperluas karena kebutuhan akan pegawai administrasi rendahan oleh pemerintah, serta perusahaan-perusahaan swasta membutuhkan banyak tenaga kerja rendahan.

Kemajuan ekonomi yang disertai perkembangan pendidikan dan depresi ekonomi membawa kemunduran pendidikan (Nasution, 2014:29). Kebutuhan pemerintah dalam memenuhi kekurangan pegawai rendahan dijadikan sebagai

ukuran untuk memperluas pendidikan rendah bagi anak-anak pribumi. Kemajuan ekonomi mempengaruhi sifat dari pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak pribumi. Pemerintah yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan mengakibatkan meluasnya sistem pendidikan yang bersifat vertikal.

HIOC (*Hollands Inlandsch Onderwijs Commissie*) atau Komisi Sekolah Belanda untuk Pribumi mengajukan pengurangan jumlah HIS (Nasution, 2014:30). Pengurangan jumlah HIS dilakukan karena tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pemerintah hanya untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai rendahan, baik dalam pemerintahan maupun perusahaan swasta. Pekerjaan yang ada pada kenyataannya tidak terbuka secara lebar bagi anak-anak Jawa. Pekerjaan yang ada di daerah kota telah dimonopoli oleh orang-orang Cina, sedangkan pekerja yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik Barat hanyalah lulusan dari sekolah teknik menengah, dan itu hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda. Anak-anak pribumi hanya dipekerjakan sebagai buruh kasar dengan upah yang sangat rendah.

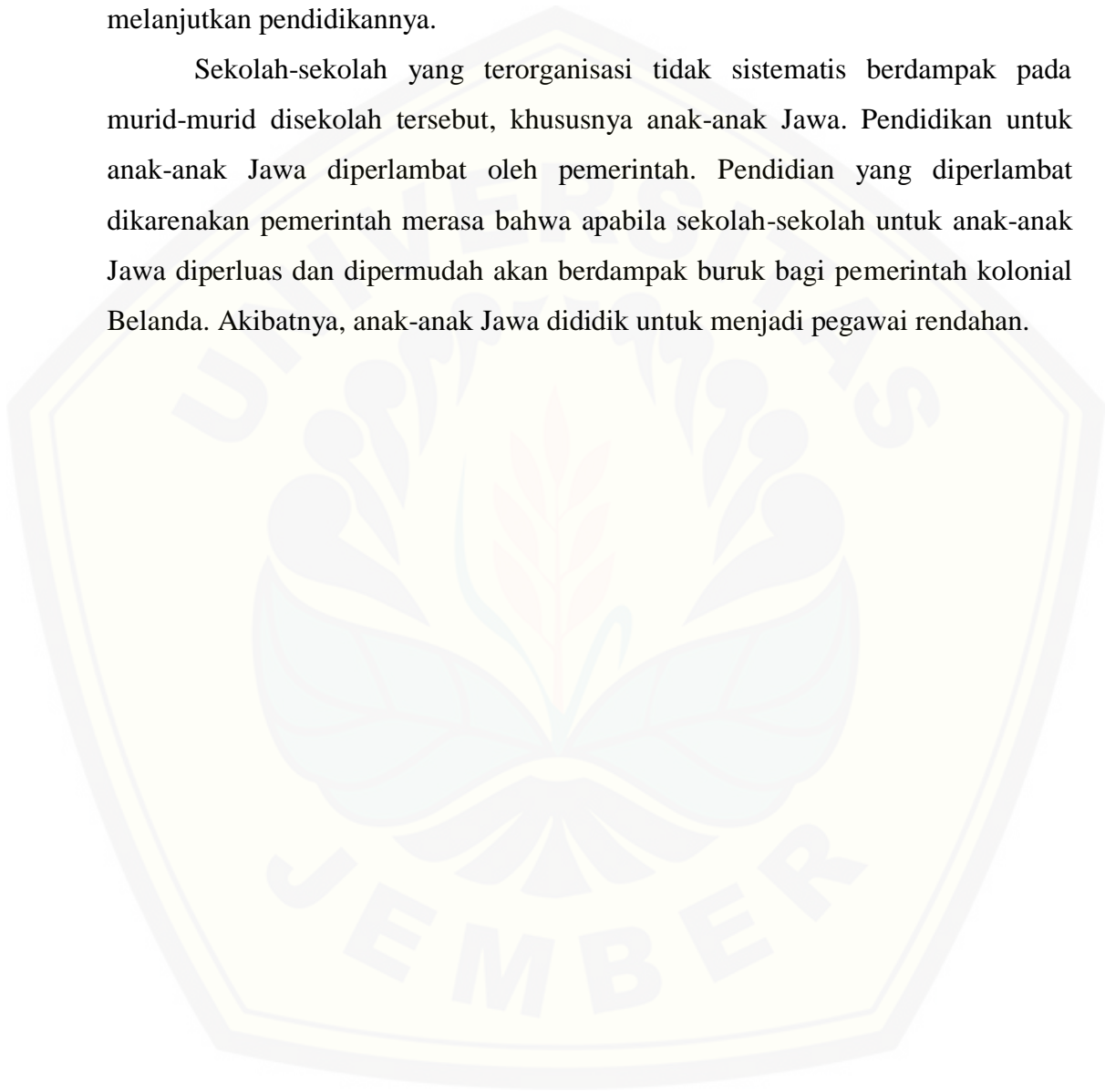
f. Tidak adanya Perencanaan Pendidikan yang Sistematis

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah untuk anak-anak Jawa disesuaikan dengan kondisi wilayah atau daerah, namun tetap sekolah rendahan. Sekolah rendahan misalnya Sekolah Desa diperuntukkan bagi anak-anak pribumi yang berada di pedesaan, Sekolah Kelas Dua diperuntukkan bagi rakyat biasa yang berada di daerah perkotaan, sedangkan Sekolah Kelas Satu diperuntukkan bagi anak-anak dari kaum ningrat dan kaum elit. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda tidak mempunyai hubungan organisasi yang baik antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Sekolah-sekolah tersebut tidak mempunyai arah atau jalan untuk kelanjutan dari masing-masing sekolah.

Sekolah untuk pegawai hanya dapat dimasuki oleh orang-orang tertentu melalui ELS (Nasution, 2014:32-33). Anak-anak Jawa yang bukan anak kaum elit ataupun ningrat tidak dapat masuk dalam sekolah pegawai tersebut. Sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak Belanda sudah terorganisasi secara lengkap daripada sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak Jawa.

Anak-anak Belanda yang lulus dari sekolah-sekolah tersebut dapat dengan mudah melanjutkan pendidikannya, baik melanjutkan ke Negeri Belanda maupun melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi yang ada di Indonesia. Anak-anak Jawa yang telah lulus dari sekolah-sekolah ELS tidak dapat dengan mudah melanjutkan pendidikannya.

Sekolah-sekolah yang terorganisasi tidak sistematis berdampak pada murid-murid disekolah tersebut, khususnya anak-anak Jawa. Pendidikan untuk anak-anak Jawa diperlambat oleh pemerintah. Pendidikan yang diperlambat dikarenakan pemerintah merasa bahwa apabila sekolah-sekolah untuk anak-anak Jawa diperluas dan dipermudah akan berdampak buruk bagi pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, anak-anak Jawa dididik untuk menjadi pegawai rendahan.



BAB 6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Politik pendidikan kolonial Belanda yang melatarbelakangi pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928 adalah dualisme, gradualisme, konkordansi, kontrol sentral yang kuat, keterbatasan tujuan, dan tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis. Van Deventer melaksanakan program pemerintahannya untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, yang dikenal dengan politik etis. Politik etis yang dijalankan Van Deventer meliputi tiga bidang yaitu; irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Van Deventer dalam bidang pendidikan mengembangkan pelajaran berbahasa Belanda. Sejak dilaksanakan politik etis kemajuan pendidikan tampak pesat di wilayah Jawa.

Sistem pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928. Sistem pendidikan di Jawa dibagi menjadi dua, antara lain; pendidikan untuk bangsa Asing, dan pendidikan untuk masyarakat Jawa sendiri. Pendidikan untuk bangsa Asing diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan anak-anak Timur Asing (Cina). Pendidikan untuk masyarakat Jawa terbagi menjadi dua, yaitu; pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial dan pendidikan yang diselenggarakan oleh tokoh pergerakan nasional. Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial meliputi pendidikan rendah (ELS, HIS, *Schakelschool*, *Volksschool*, *Vervolgschool*, *de schoolen der eerste klasse*, dan *de schoolen der tweede klasse*), pendidikan menengah (MULO, AMS, HBS), pendidikan kejuruan (*Ambachts Leergang*, *Technisch Onderwijs*, *Landbouw Onderwijs*, *Handels Onderwijs*), dan pendidikan tinggi (STOVIA, *Rechtsschool*, *Technische Hogeschool*). Pendidikan yang diselenggarakan oleh tokoh pergerakan nasional meliputi pendidikan wanita (R.A Kartini, Rd. Dewi Sartika), Taman Siswa, Sekolah SI, Ksatrian Institut, dan Muhammadiyah.

6.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

- 1) bagi calon pendidik sejarah dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang mengkaji secara mendalam tentang pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928;
- 2) bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi yang ingin melakukan penelitian mengenai pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928; serta
- 3) bagi masyarakat luas khususnya pemerintah, semoga tulisan ini menjadi pembelajaran bahwa pendidikan yang terjadi pada masa Pergerakan Nasional menjadi tonggak dalam memperbaiki pendidikan saat ini, sehingga tidak terjadi lagi dualisme pendidikan seperti pada masa Pergerakan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Agung, L. & T. Suparman. 2016. *Sejarah Pendidikan, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ahmadi, A & N. Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewantara, K.H. (2004). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan. Cetakan ketiga*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dewantara, K.H. (1994). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Kedua: Kebudayaan. Cetakan kedua*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Djojonegoro, I. Wardiman. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Ekadjati, E. S. 1984. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Gottschalk. 1975. *Mengerti Sejarah. Terjemahan oleh Nugroho Noosusanto*. Jakarta: UI Press.
- Imran, A. Tanpa Tahun. *Mohammad Hatta: Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa*. Mutiara Sumber Widya.
- Kartodirdjo, S. 1990. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Malaka, T. 2011. *Serikat Islam dan Onderwijs: Sebuah Karya Tan Malaka Tahun 1921*. Jakarta: Pustaka Kaji.
- Madjid, M. D & Johan W. 2014. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mangunpranoto, S. 1978. *Pendidikan sebagai Sistem Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu.

- Mudyahardjo, R. 2006. *Pengantar Pendidikan - Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, S. 2014. *Sejarah Pendidikan Indonesia, Cetakan kelima*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Niel, R. V. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Bogor: Pustaka Jaya.
- Notosusanto, N. 1971. *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sedjarah*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI.
- Poerbakawatja, S. 1970. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- Poesponegoro, M. D. & Nugroho N. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. (2009). *Ki Hajar Dewantara: Biografi Singkat 1889-1959*. Yogyakarta: Garasi.
- Ricklefs, M. C. 1998. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Said, M & D. Mansoer. 1959. *Mendidik dari Zaman ke Zaman*. Bandung: PT Pustaka Rakyat.
- Sjamsuddin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Soemanto, W. & F. X. Soeyarno. 1983. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soetjianingsih, S. 1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*. Surabaya: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Suryosubroto, B. 1990. *Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan, Cetakan Kedua*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tamburaka, R. E. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Vembriarto, St. 1993. *Sosial Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo.

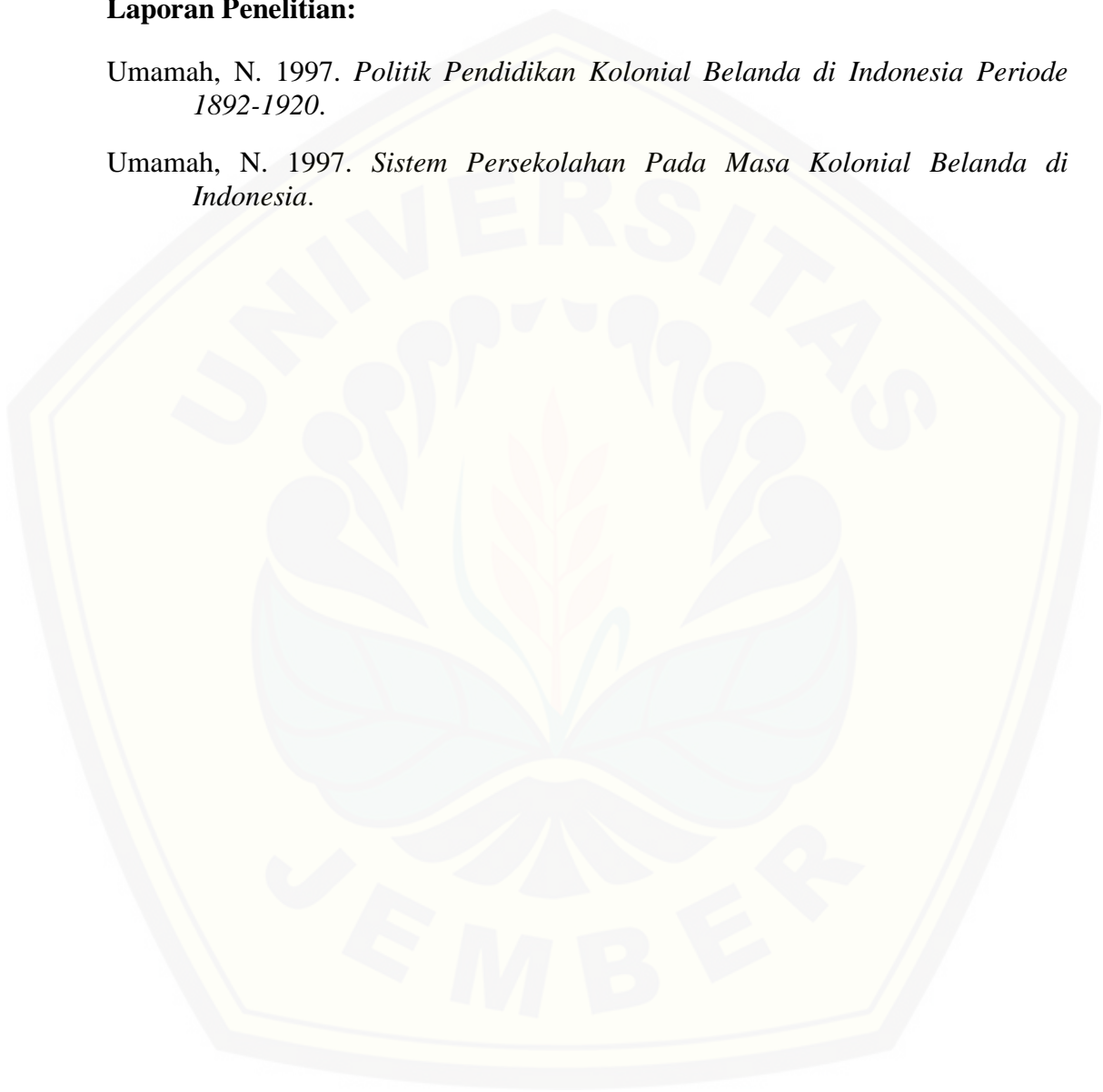
Skripsi:

Heru, F. S. Sofyan. 2014. "Sistem Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1900-1942". Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.

Laporan Penelitian:

Umamah, N. 1997. *Politik Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Periode 1892-1920*.

Umamah, N. 1997. *Sistem Persekolahan Pada Masa Kolonial Belanda di Indonesia*.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

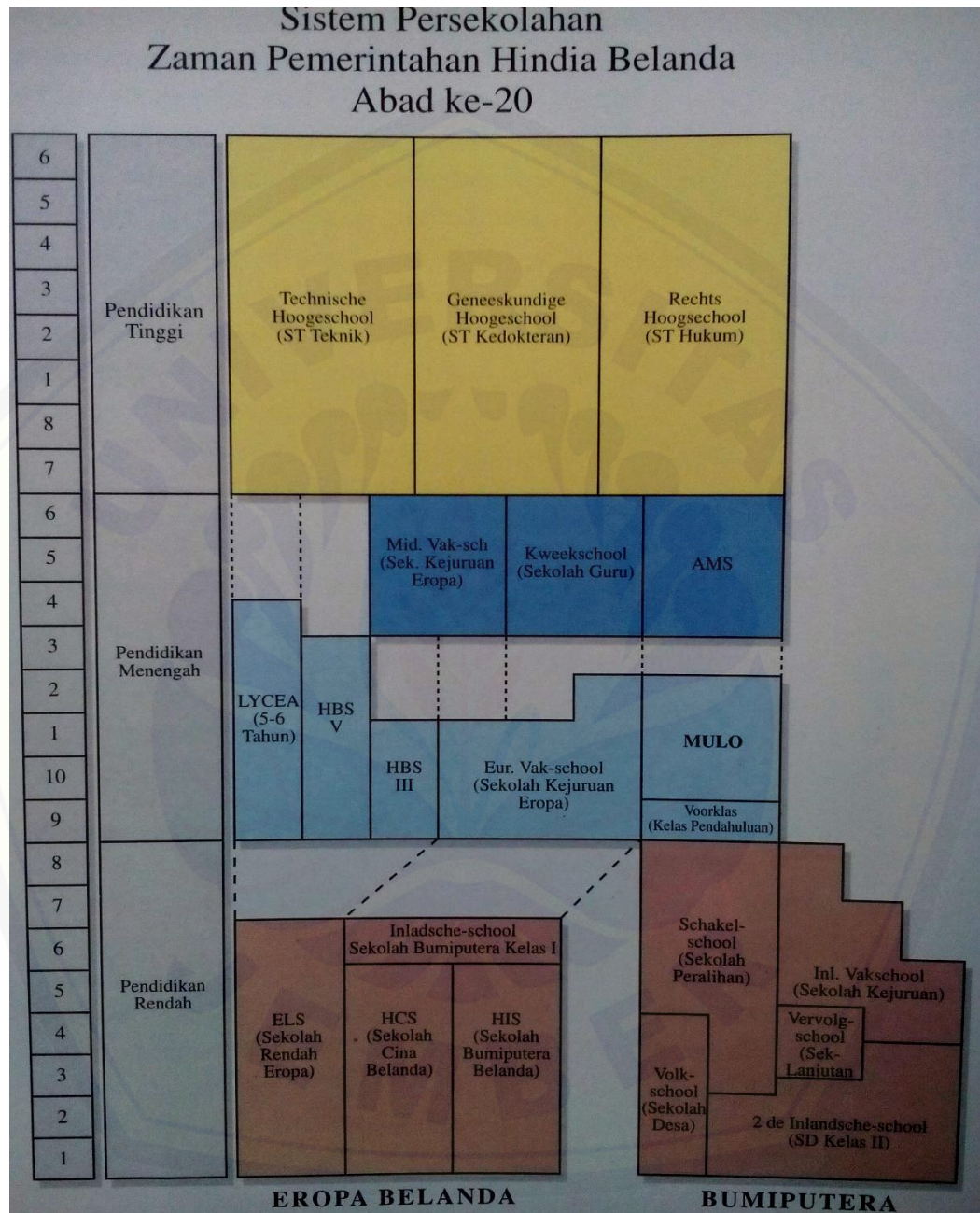
LAMPIRAN A. MATRIK PENELITIAN

MATRIK PENELITIAN

Topik	Judul Penelitian	Sumber Data	Permasalahan	Jenis dan Sifat Penelitian	Metode Penelitian
Sejarah Nasional	Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1908-1928	Buku Primer dan Buku Sekunder	1. bagaimanakah kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928? 2. bagaimanakah bentuk pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928?	1. Jenis Penelitian: Penelitian Sejarah 2. Sifat Penelitian: Penelitian Kepustakaan atau Studi Literatur	Metode Penelitian Sejarah

Topik	Judul Penelitian	Sumber Data	Permasalahan	Jenis dan Sifat Penelitian	Metode Penelitian
			3. bagaimanakah dampak pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928?		

LAMPIRAN B



Sumber: Djojonegoro, W. 1996. *Lima puluh tahun perkembangan pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud. hlm 36

LAMPIRAN C

Tabel 1.9
Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah
Sekolah Dasar Eropa (Europeesche Lagere School)
Tahun 1900-1940

Tahun	Sekolah			Murid Negeri				Murid Swasta				Jumlah
	Negeri	Swasta	Jumlah	Eropa	Pribumi	Cina	Sub Jml	Eropa	Pribumi	Cina	Sub Jml	
1900	169	23	192	13.592	1.545	325	15.462	3.433	70	27	3.530	18.992
1905	184	30	214	15.105	3.752	525	19.382	3.944	183	206	4.333	23.715
1910	191	33	224	17.519	3.427	828	21.774	4.205	247	549	5.001	26.775
1915	195	40	235	19.712	4.197	1.093	25.002	5.282	345	931	6.558	31.560
1920	196	53	249	20.357	5.387	1.416	27.160	7.918	766	1.120	9.804	36.964
1925	182	73	255	20.325	4.356	1.492	26.173	12.442	821	1.059	14.322	40.495
1930	196	104	300	19.773	3.357	1.279	24.409	17.875	735	1.288	19.898	44.307
1935	170	107	277	18.295	3.659	874	22.828	20.058	1.088	1.059	22.205	45.033
1940	174	118	292	18.076	4.034	609	22.719	22.775	1.116	672	24.563	47.282

Sumber: Djojonegoro, W. 1996. *Lima puluh tahun perkembangan pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud. hlm 62

LAMPIRAN D

Tabel 1.12
Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah
Sekolah Bumiputera-Belanda (Hollandsch Inlandsche School)
Tahun 1915-1940

Tahun	Sekolah			Murid Negeri				Murid Swasta				Jumlah
	Negeri	Swasta	Jumlah	Pribumi	Cina	Eropa	Sub Jml	Pribumi	Cina	Eropa	Sub Jml	
1915	102	22	124	19.577	128	14	19.719	2.900	100	15	3.015	22.734
1920	132	67	199	26.149	428	82	26.659	7.055	143	41	7.239	33.898
1925	156	106	262	35.389	639	168	36.196	20.445	606	129	21.180	57.376
1930	192	100	292	37.453	1.011	244	38.708	21.332	706	164	22.202	60.910
1935	190	96	286	39.633	956	337	40.926	20.462	512	140	21.114	62.040
1940	186	99	285	45.933	654	355	46.942	24.431	460	143	25.034	71.976

Sumber: Djojonegoro, W. 1996. *Lima puluh tahun perkembangan pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud. hlm 64

LAMPIRAN E

Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah
Sekolah Cina Belanda (Hollandsch Chineesche School)
Tahun 1908-1940

Tahun	Sekolah			Murid Negeri				Murid Swasta				
	Negeri	Swasta	Jumlah	Cina	Pribumi	Eropa	Sub-Jml	Cina	Pribumi	Eropa	Sub-Jml	Jumlah
1908	4	.	4	821	.	.	821	821
1910	17	.	17	2.697	36	7	2.740	2.740
1915	29	2	31	5.323	71	20	5.414	283	38	.	321	5.735
1920	34	14	48	7.783	140	52	7.975	1.958	189	99	2.246	10.221
1925	41	30	71	9.921	176	45	10.142	5.364	398	88	5.850	15.992
1930	65	45	110	12.696	247	55	12.998	7.782	730	107	8.619	21.617
1935	62	44	106	12.410	322	74	12.806	8.718	1.089	243	10.050	22.856
1940	62	48	110	12.941	541	122	13.604	9.877	1.667	319	11.863	25.467

Sumber: S.L. Van der Wal (ed), *Het Onderwijsbeleid in Nederlands-Indie 1900-1940*, 1963

Sumber: Djojonegoro, I. W. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud. Hlm 63

LAMPIRAN F

Tabel 1.14
Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah
Sekolah Desa (Volksschool)
Tahun 1907-1940

Tahun	Sekolah			Murid		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1907	122	...	122
1910	1.161	...	1.161	71.239	...	71.239
1915	4.448	...	4.448	310.867	...	310.867
1920	7.771	...	7.771	423.314	...	423.314
1925	10.769	...	10.769	734.495	...	734.495
1930	13.716	2.889	16.605	1.074.777	154.889	1.229.666
1931	16.921	1.320.131
1932	16.075	1.368.692
1933	16.398	1.423.387
1934	16.728	1.507.931
1935	14.482	2.480	16.962	1.404.608	190.532	1.595.140
1940	15.131	2.587	17.718	1.662.484	233.890	1.896.374

Catatan: ... Tidak tersedia data
Sumber: S.L. Van der Wal (ed), *Het Onderwijsbeleid in Nederlands-Indie 1900-1940*, 1963

Sumber: Djojonegoro, I. W. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud. Hlm 65

LAMPIRAN G

Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah Sekolah Peralihan (Schakelschool) Tahun 1921-1940

Tahun	Sekolah			Murid Negeri				Murid Swasta				
	Negeri	Swasta	Jumlah	Pribumi	Cina	Eropa	Sub Jml	Pribumi	Cina	Eropa	Sub Jml	Jumlah
1921	2	.	2	71	.	.	71	71
1925	13	5	18	695	11	.	706	245	.	.	245	951
1930	43	15	58	3.622	22	14	3.658	1.134	7	4	1.145	4.803
1935	28	13	41	3.020	37	.	3.057	1.649	21	8	1.678	4.735
1940	35	17	52	3.846	33	3	3.882	1.904	223	2	2.129	6.011

Sumber: S.L. Van der Wal (ed), *Het Onderwijsbeleid in Nederlands-Indie 1900-1940*, 1963

Sumber: Djojonegoro, I. W. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud. Hlm 66

LAMPIRAN H

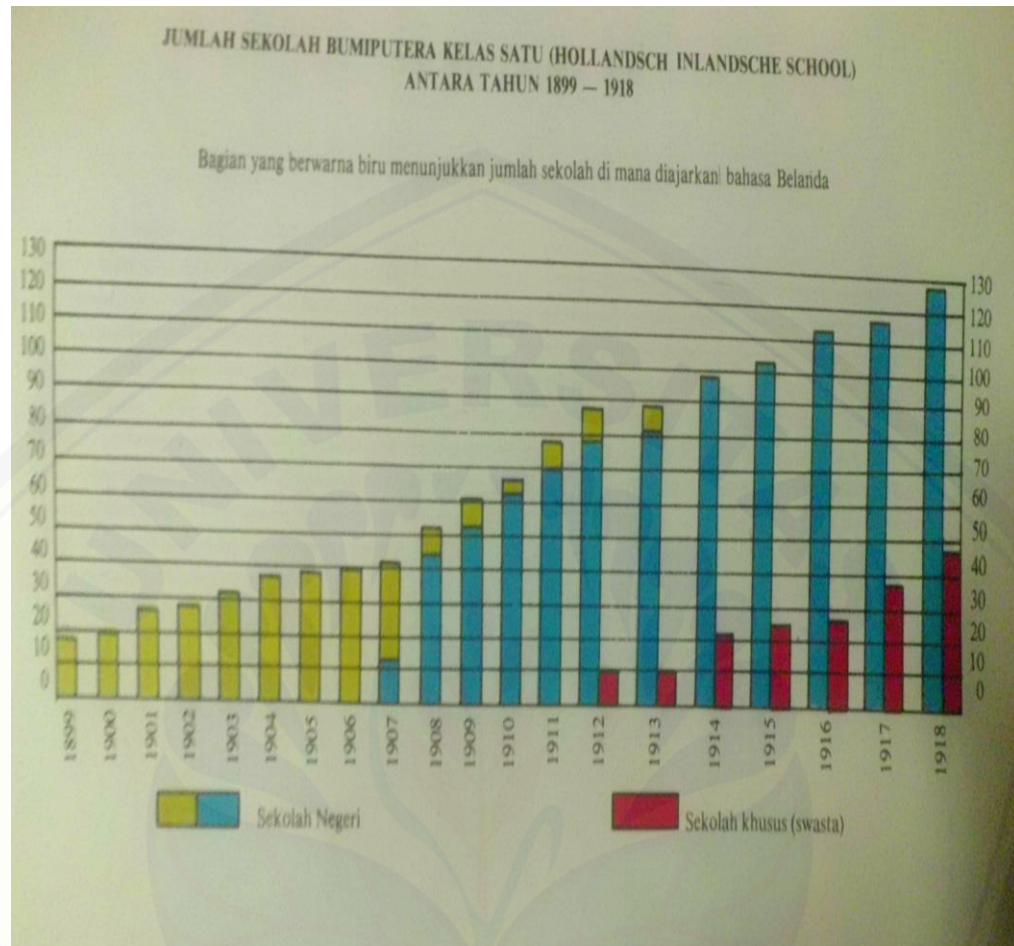
19061.120

**Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah
Sekolah Menengah Umum (AMS)
Tahun 1919-1940**

Tahun	Sekolah		Jumlah	Murid Negeri			Sub Jml	Murid Swasta			Sub Jml	Jumlah
	Negeri	Swasta		Pribumi	Eropa	Cina		Pribumi	Eropa	Cina		
1919	1	-	1	22	15	5	42	-	-	-	-	42
1925	2	-	2	154	74	28	255	-	-	-	-	255
1930	7	2	9	576	118	178	872	73	47	59	179	1.051
1935	5	2	7	672	131	202	1.005	103	95	82	280	1.285
1940	6	4	10	738	139	185	1.065	184	179	116	481	1.546

Sumber: Djojonegoro, W. 1996. *Lima puluh tahun perkembangan pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud. hlm 68

LAMPIRAN I



Sumber: Mestoko, S, dkk. 1986. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 115